

(SPECIFIC DOMAIN → OTHER DOMAIN)

OPEN DATA ECOSYSTEM HELPS GOVERNMENT MORE EFFICIENT

EVIDENCE-BASED RECOMMENDATIONS TO GOVERNMENT

changes within (here GOV) pushed us together w/ SOs to evidence-based feedback & engagement

OPEN DATA →

Common Learning

a shift from anti-corruption discourse to

DATA TERBUKA DAN KETERBUKAAN FISKAL: BAGAIMANA KITA DAPAT MEMPEROLEH MANFAATNYA?

PEMBELAJARAN DARI PROYEK PERCONTOHAN DI INDONESIA DAN FILIPINA



MAKALAH PEMBELAJARAN



Ringkasan

Setiap hari, pemerintah nasional, regional, dan lokal membelanjakan banyak uang pajak rakyat. Namun, seringkali terjadi kekurangterbukaan penggunaan dana publik ini. Di Indonesia dan Filipina, kelompok masyarakat sipil telah secara konsisten menuntut lebih banyak akuntabilitas keuangan publik dalam bidang-bidang seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah, pendidikan, dan infrastruktur. Organisasi-organisasi ini sangat percaya pada dampak positif dari penguatan keterbukaan fiskal terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, pengurangan korupsi, dan pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil di kedua negara¹, dan didukung dana dari *Southeast Asia Technology and Transparency Initiative* (SEATTI), *Web Foundation's Open Data Lab Jakarta* (Jakarta Lab) berupaya menjelajahi bagaimana data terbuka dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi keterbukaan fiskal di wilayah tersebut. Makalah ini merangkum pendekatan yang kami gunakan, dan yang lebih penting, pelajaran yang kami petik.

Kami menemukan bahwa kunci utama kesuksesan adalah partisipasi aktif dan dedikasi mitra proyek yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang keterbukaan fiskal. Berinvestasi untuk mengembangkan kapasitas mereka agar dapat bekerja dengan data terbuka dan meyakinkan pemerintah untuk berbagi informasi terbukti merupakan solusi yang efektif.

Penulis utama: Michael Canares dan Andreas Pawelke

Copy-editing dan lay-out: Dillon Mann dan Denise Karunungan

Kontribusi tambahan: Michael Gurstein, Redemto Parafina, Lukman Hakim, dan mitra kami dari Perkumpulan Idea, INCITEGov, *E-NET Philippines*, dan Pattiro Surakarta

Makalah Pembelajaran ini pertama diterbitkan pada 15 Januari 2016.

¹ Istilah 'mitra proyek' dalam dokumen ini digunakan untuk merujuk kepada empat organisasi yang bekerja bersama *Open Data Lab Jakarta* untuk melaksanakan proyek ini: *E-Net Philippines*, INCITEGov, Pattiro Surakarta dan Perkumpulan IDEA.

1. Latar Belakang

Sebagai anggota pendiri *Open Government Partnership*², Indonesia dan Filipina berada di garda terdepan dalam menjajaki pendekatan baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Dalam rangka memperkuat dan mendukung reformasi tatakelola pemerintahan, kedua negara telah membuat kemajuan besar dalam membuka data pemerintah untuk umum. Peluncuran *portal* data terbuka nasional Indonesia³, yang berisi *dataset* dari kementerian-kementerian di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di daerah, mendemonstrasikan komitmen pemerintah untuk memberikan akses data yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini sejalan dengan sasaran Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi demokratik melalui peningkatan keterbukaan dan pemberantasan korupsi di pemerintahan.⁴ Meskipun upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan akses tak terbatas ke data pemerintah patut mendapat pujian, penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterampilan di berbagai sektor untuk memanfaatkan data secara efektif, terutama di antara kelompok masyarakat sipil⁵, menghambat penggunaan data pemerintah yang dapat menghasilkan perubahan positif yang konkret.

Demikian pula, pembuatan *portal* data terbuka nasional di Filipina⁶, bersama dengan pedoman implementasi data terbuka pemerintah⁷ yang baru-baru ini diluncurkan untuk memberdayakan masyarakat dan mempertahankan keterbukaan melalui data pemerintah yang mudah diakses, merupakan langkah penting menuju pemerintah yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel. Serupa dengan Indonesia, upaya ini berakar dari kampanye anti korupsi Presiden Benigno Aquino III dan upaya pemulihan kepercayaan publik.⁸ Tapi serupa dengan pengalaman Indonesia, banyak organisasi masyarakat sipil (CSO) lokal belum menyadari konsep data terbuka, potensi manfaatnya, dan alat bantu yang ada untuk menganalisis, menafsirkan, dan mendiseminasi data.⁹

Di kedua negara, kami menemukan bahwa meski terdapat pengakuan akan pentingnya isu-isu tata kelola pemerintahan, terdapat keterbatasan dukungan kepada CSO untuk memungkinkan mereka memanfaatkan potensi semakin banyaknya data yang dapat diakses. Berdasarkan penelitian, kami menyimpulkan bahwa meskipun pelatihan *data literacy* dapat membangun sebagian kapasitas yang dibutuhkan, diperlukan proses jangka panjang secara terus menerus dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari target sasaran, untuk memastikan bahwa akses data, bersama dengan pengembangan kapasitas, membuahkan hasil nyata dan positif.

² Ketahui lebih lanjut mengenai *Open Government Partnership* di <http://www.opengovpartnership.org/>

³ Kunjungi portal data nasional Indonesia di <http://data.go.id/>

⁴ Sumber: <http://www.establishmentpost.com/jokowis-nine-priorities-agenda-nawa-cita/>

⁵ Sumber: <http://webfoundation.org/wp-content/uploads/2013/06/OGD-Indonesia-FINAL-for-publication.pdf>

⁶ Kunjungi portal data nasional Filipina di <http://data.gov.ph/>

⁷ Sumber: <http://data.gov.ph/news/guidelines-open-data-implementation-jmc-no-2015-01>

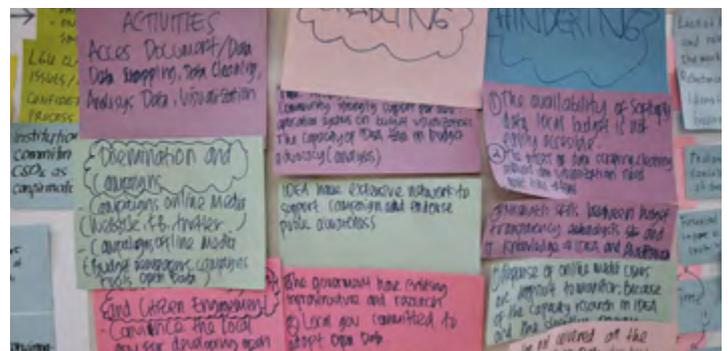
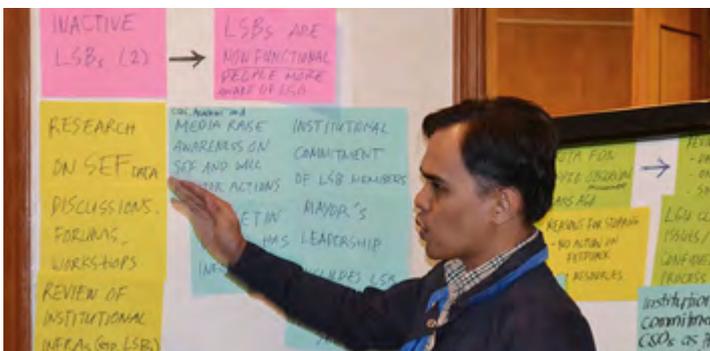
⁸ Sumber: <http://www.pep.ph/news/44332/full-transcript-of-president-noynoy-aquino39s-fifth-state-of-the-nation-address>

⁹ Lihat contohnya <http://www.opendataresearch.org/dl/symposium2015/odrs2015-paper15.pdf>

1. Latar Belakang

Seperti halnya data terbuka, keterbukaan fiskal juga merupakan agenda yang diprioritaskan di kedua negara. Sejak tahun 2011, pemerintah lokal di Filipina diharuskan menerbitkan data keuangan dan pengadaan secara *online*.¹⁰ Namun, kebijakan ini hanya akan berdampak signifikan ketika data tersebut dimanfaatkan, yang mana hal ini membutuhkan pemahaman yang memadai dan keterampilan untuk menerjemahkan data yang kompleks tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami. Di Indonesia, terdapat upaya baru dan yang sedang berjalan untuk mencapai pemerintahan yang lebih terbuka, seperti membangun *portal* data terbuka tingkat kota yang berisi dataset terpilih, dan UU Kebebasan Informasi Tahun 2008,¹¹ yang membuat masyarakat dapat mendapatkan informasi melalui jalur permohonan yang tepat. Akan tetapi, meski terdapat kemajuan ini, berbagai tantangan terkait keterbukaan dalam keuangan publik, terutama di tingkat daerah, masih tetap ada. Dengan diterbitkannya UU Desa di Indonesia,¹² yang telah menghasilkan peningkatan substansial dalam hal anggaran yang tersedia untuk pemerintah daerah, kebutuhan akan pengawasan efektif terhadap penggunaan dana publik di tingkat daerah semakin besar.

Gambar 1 hingga 3. Kesulitan bekerja—setiap organisasi dihadapkan pada tantangan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mereka hadapi dalam proyek mereka. IDEA dan Pattira sedang berdiskusi dengan pendamping Lukman Hakim; Addie Unsi dari E-Net Philippines membicarakan tentang faktor-faktor mereka, dan display dinding temuan, semuanya selama lokakarya akhir yang diselenggarakan di Manila, Juni 2015 lalu.



¹⁰ Sumber: <http://www.opendataresearch.org/project/2013/step>

¹¹ Sumber: <http://www.right2info.org/resources/publications/laws-1/Indonesia-Public-Information-Disclosure-Act-2008.docx#wiki>

¹² Sumber: <http://pnpm-support.org/news/implementation-village-law-and-sustainability-pnpm-rural>

2. Apa yang ingin kami capai?

Dengan proyek ini, kami bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat sipil untuk menggunakan data terbuka dalam meningkatkan keterbukaan fiskal pemerintah di tingkat lokal di daerah-daerah terpilih di Indonesia dan Filipina. Untuk mencapai hal ini, kami bekerja sama dengan CSO yang mempunyai pengalaman menghadapi isu-isu fiskal, dan meningkatkan keterampilan mereka dengan memberikan pelatihan dan membuat mereka mampu secara lebih efektif menggunakan data tentang dana publik dan data pembelanjaan untuk memonitor penggunaan dana publik oleh pemerintah. Intervensi lokal kemudian dijadikan proyek percontohan.

Di akhir proyek, kami berharap mitra dapat secara independen menemukan dan mengakses data yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan mereka, memahami bagaimana memanfaatkan potensi data terbuka dan memadukannya ke dalam kegiatan mereka di masa mendatang secara efektif dan berkelanjutan, dan bertindak sebagai penggiat data terbuka di antara CSO lain di negara mereka masing-masing.

Bagan 1. Representasi visual Indonesia, dengan menandai lokasi-lokasi proyek OD4Transparency.



Boks 1. Mitra proyek OD4Transparency (berlanjut di halaman berikutnya).

INDONESIA

Perkumpulan IDEA secara aktif terlibat dalam kegiatan keterbukaan anggaran. CSO ini menerjemahkan data anggaran pemerintah ke dalam format yang dapat dipahami masyarakat. Berbasis di Yogyakarta, organisasi ini berfokus pada pendidikan publik tentang anggaran pemerintah dan mengadvokasi reformasi dalam pengelolaan fiskal publik.

Pattiro Surakarta terlibat dalam penelitian, manajemen informasi, pelatihan dan penerbitan, dan pengembangan partisipasi masyarakat lokal. Mereka juga mengerjakan advokasi anggaran, pelayanan publik, dan memberikan bantuan kepada masyarakat terpinggirkan, serta mendukung keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

2. Apa yang ingin kami capai?

Bagan 2. Representasi visual Filipina¹³, dengan menandai lokasi-lokasi proyek OD4Transparency.



FILIPINA

INCITEGov mengerjakan reformasi tata kelola pemerintahan di Filipina dengan memfokuskan pada tiga pilar – politik demokratis, tata kelola pemerintahan yang baik, dan hasil pembangunan. Organisasi ini melaksanakan penelitian, analisis kebijakan, pengembangan kapasitas, dan advokasi kebijakan untuk melanjutkan reformasi demokrasi di negara ini.

E-NET Philippines adalah jaringan CSO di Filipina yang mengerjakan reformasi pendidikan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas menjadi hak asasi bagi semua orang. Kegiatan utama organisasi ini berfokus pada pembiayaan pendidikan, penguatan sistem pembelajaran alternatif, dan kemitraan masyarakat sipil dengan pemerintah untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik.

¹³ Sumber: Peta Filipina – Satu Warna oleh FreeVectorMaps.com.

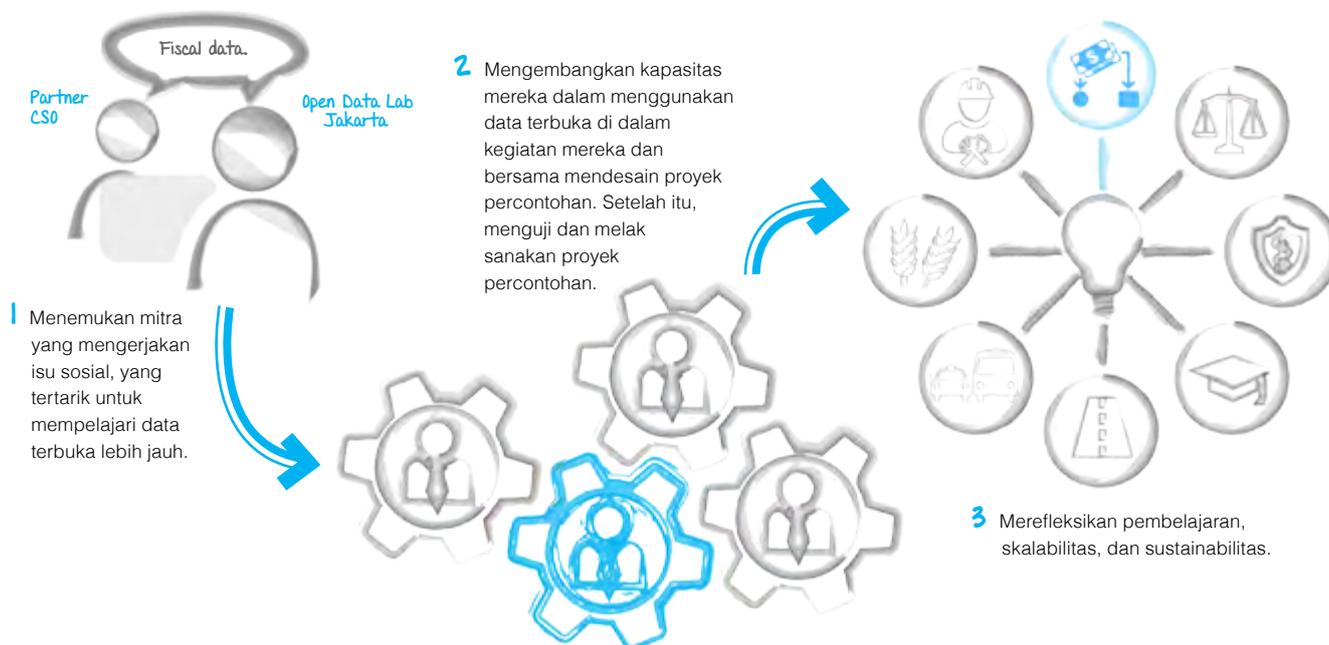
Mohon dicatat bahwa peta-peta dan penanda mungkin bukanlah gambaran persis dari negara tersebut.

3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

Kami mendesain proyek yang akan memperkuat kapasitas CSO untuk menggunakan data terbuka untuk mendorong keterbukaan fiskal. Dalam proyek ini, kami langsung bekerja dengan CSO, tanpa harus berinteraksi dengan pemerintah, sebagaimana yang terjadi di banyak proyek inovasi kami yang lain, seperti inisiatif di Banda Aceh¹⁴ dan Jakarta.¹⁵

Proyek ini dibagi menjadi tiga tahap: Pertemuan dan Perencanaan, Intervensi Percontohan, dan Refleksi.

Bagan 3. Tahapan-tahapan pada proyek OD4Transparency: Pertemuan dan perencanaan, intervensi percontohan, dan refleksi.



TAHAP SATU: PERTEMUAN DAN PERENCANAAN

Tahap pertama proyek terdiri dari pengidentifikasian mitra proyek di Indonesia dan Filipina, dan mempertemukan mereka dalam suatu lokakarya, di mana mereka berbagi praktik organisasional terkini dalam rangka mengkampanyekan dan mendorong keterbukaan fiskal. Lokakarya ini juga mencakup pelatihan untuk mengembangkan kapasitas para peserta mengenai data terbuka. Dengan bantuan tiga pendamping ahli¹⁶, kami menyelenggarakan pelatihan untuk memperkenalkan konsep data terbuka dan memberikan gambaran umum tentang alat bantu dan pendekatan yang dapat digunakan para praktisi untuk mengakses, menganalisis, dan menafsirkan data. Setelah terjadinya pertukaran pengetahuan ini, dan menggunakan keterampilan dan pemahaman yang baru mereka dapat, mitra proyek mendefinisikan proyek percontohan yang akan menggunakan data terbuka untuk mendorong keterbukaan fiskal.

¹⁴ Baca lebih lanjut mengenai hal ini di <http://labs.webfoundation.org/wp-content/uploads/2015/09/Lessons-Learned-FOIODAceh.pdf>

¹⁵ Baca lebih lanjut mengenai hal ini di <http://labs.webfoundation.org/projects-2/jodi/>

¹⁶ Michael Gurstein dari *Center for Community Informatics Research, Development, and Training*, Don Parafina dari *Affiliated Network on Social Accountability in East Asia and the Pacific*, dan Lukman Hakim, saat itu menjabat sebagai Seknas Fitra.

3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

TAHAP DUA: INTERVENSI PERCONTOHAN

Dengan rancangan intervensi percontohan yang dikembangkan di tahap pertama, dan setelah terus mengembangkan keterampilan dan kapasitas yang diperoleh selama pelatihan, mitra proyek melaksanakan proyek mereka masing-masing. Dipandu oleh pendamping lokal dan internasional, setiap organisasi menangani isu-isu keterbukaan keuangan tertentu dengan data terbuka, yang terdaftar di bawah ini.

Gambar 4. IDEA berkonsultasi dengan salah satu pendamping tentang bagaimana cara terbaik dalam melaksanakan proyek mereka dan menyusun rencana kerja, dalam lokakarya awal yang diselenggarakan pada September 2014.



Boks 2. Hasil-hasil proyek OD4Transparency.

INDONESIA

Perkumpulan IDEA melakukan kegiatan advokasi anggaran di kota Yogyakarta dengan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pemerintah kota menggunakan uang pajak untuk memberikan pelayanan ekonomi, sosial, dan budaya kepada masyarakat. Di masa lalu, mereka perlu enam hingga delapan minggu untuk mengkonversi buku-buku tebal menjadi format yang mereka dapat ringkas, visualisasikan, dan paparkan lewat *media* cetak, seperti poster dan surat kabar. Kami ingin membantu IDEA mempersingkat waktu tersebut, dan mencari cara-cara yang lebih efisien untuk berkomunikasi. Sebagai langkah pertama untuk mengurangi waktu pengolahan data, kami mendorong IDEA untuk meminta pemerintah kota untuk memberikan

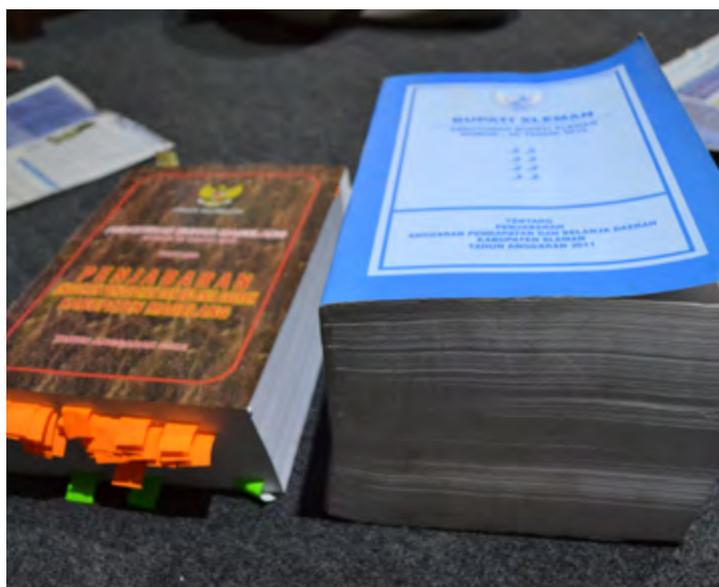
3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

Kemudian, kami bekerja sama dengan IDEA untuk menyarikan data dari file PDF dan mengkonversikannya ke CSV (sebuah format yang terbuka, mudah digunakan, dan dapat dianalisis). Kami juga memandu IDEA dalam mengembangkan situs web “Data Terbuka APBD”¹⁷ mereka, sehingga publik lebih mudah mengakses informasi terkait anggaran secara *online*. Untuk membuat informasi anggaran lebih menarik, IDEA memvisualisasikan data anggaran dan menyebarkan secara *offline* (contoh: surat kabar) dan *online* (contoh: situs web, *Facebook*, dan *Twitter*).

Hasilnya, IDEA dapat menjangkau lebih dari 7.500 warga kota di Yogyakarta, sepuluh kali lipat dari yang berhasil mereka jangkau melalui kegiatan advokasi anggaran mereka sebelumnya. Selain itu, mereka mampu melatih 104 orang tentang bagaimana menggunakan data terbuka untuk memonitor anggaran kota.

IDEA kini sedang dalam proses memformalisasikan kemitraan dengan kantor pajak daerah dan kantor manajemen keuangan Yogyakarta untuk menjamin publikasi anggaran kota secara proaktif dan menghubungkan situs web pemerintah kota ke portal APBD Data Terbuka IDEA yang baru. Organisasi ini juga tengah memperkuat upayanya untuk meningkatkan penggunaan informasi anggaran oleh masyarakat dan kelompok masyarakat, terutama dalam melakukan advokasi untuk alokasi sumber daya anggaran secara lebih baik untuk memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi.

Gambar 5 dan 6. Buku-buku tebal ini merupakan data anggaran dan pembelanjaan kota Yogyakarta yang diterbitkan dari tahun 2012 hingga 2014, yang divisualisasikan oleh IDEA ke dalam format surat kabar sehingga masyarakat dapat lebih memahami untuk apa uang pajak mereka digunakan.



¹⁷ APBD berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

Gambar 7. Dyah Ayu dari Pattiro memperkenalkan organisasi, proposal proyek, sasaran, dan pendekatan yang akan mereka gunakan dalam lokakarya awal.



PATTIRO Surakarta merupakan organisasi yang mengerjakan advokasi anggaran, pelayanan publik, dan pemberian bantuan ke masyarakat terpinggirkan di Surakarta (juga dikenal sebagai Solo), sebuah kota di Jawa Tengah. Dalam proyek ini, mereka bertujuan untuk menjelaskan ke masyarakat lokal bagaimana ‘dana pembangunan desa’ dibelanjakan. Dana pembangunan desa adalah *transfer* langsung dari pemerintah pusat ke desa-desa, agar dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pendukung program pertanian.

Untuk menentukan bagaimana mereka akan melibatkan masyarakat dalam isu ini, Pattiro pertama melakukan survey di antara para pemangku kepentingan di desa-desa yang terlibat dalam manajemen infrastruktur publik lokal. Ini mencakup anggota komite pelaksanaan konstruksi, pembimbing kesejahteraan keluarga, profesional di bidang monitoring dan evaluasi, institusi pemberdayaan masyarakat desa, dan fasilitator desa dari tiga desa percontohan.

Sebuah temuan besar dari penelitian ini adalah, meskipun masyarakat tahu mengenai adanya dana pembangunan desa, sebagian besar merasa data yang relevan sulit diakses dan ditemukan. Pattiro membantu mengenalkan CSO lokal dengan pentingnya data terbuka dan pengungkapan secara proaktif, dan bagaimana data terbuka dapat berpeluang membuat pemerintah kota lebih terbuka dan akuntabel, terutama dalam memberikan informasi tentang jumlah, tujuan, dan penggunaan dana pembangunan desa.

Untuk mendapatkan keyakinan dan dukungan dari pemerintah kota, Pattiro mengundang sekitar 90 pejabat pemerintah dari lembaga yang berbeda-beda dan berbicara kepada mereka mengenai pentingnya pengungkapan data pemerintah secara proaktif. Beberapa lembaga menyadari nilai dari pengungkapan proaktif ini, tapi masih ragu untuk membagikan data dalam format yang cocok. Pattiro mengadvokasikan rilis dataset infrastruktur dalam format terbuka, tapi tidak berhasil. Dinas Pekerjaan Umum merujuk permintaan mereka ke inspektorat dan

3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

departemen hukum Surakarta, dan membuat mereka menunggu lama untuk mendapatkan keputusan mengenai hal ini. Divisi perencanaan kota, di lain pihak, ragu untuk berbagi lebih banyak dataset dari yang sudah diberikan. Meskipun proyek ini gagal mendapatkan komitmen dari pemerintah, namun berhasil meningkatkan kesadaran baik dari pegawai negeri dan masyarakat bahwa data terbuka menawarkan peluang untuk pembagian dan penggunaan data yang lebih baik. Pattiro akan terus mengadvokasi isu ini dengan pimpinan pemerintah di Surakarta.

Gambar 8 hingga 10. Anggota E-Net dan INCITEGov sedang dilatih dalam mengambil dan menganalisis data; materi yang dikembangkan oleh E-Net sebagai bagian dari proyek percontohan mereka dan Toolkit Data Terbuka SEF yang ditampilkan dalam lokakarya akhir; INCITEGov mengembangkan rencana kerja awal untuk proyek mereka.



3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

FILIPINA

INCITEGov berfokus pada bagaimana CSO dapat terlibat secara lebih baik dalam kegiatan pengadaan publik dari pemerintah daerah. Meskipun UU Pengadaan di Filipina memandatkan CSO untuk mengamati proses kontrak publik, partisipasi masyarakat sipil biasanya rendah – terutama di tingkat daerah. Bermitra dengan Dewan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (*Government Procurement Policy Board* (GPPB)), INCITEGov menyelenggarakan sesi pengembangan kapasitas percontohan terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan dengan menggunakan alat bantu Indikator Kinerja Kepatuhan Pengadaan Lembaga (*Agency Procurement Compliance Performance Indicator* (APCPI)) sebagai titik masuk. Alat ini, yang dikembangkan oleh GPPB namun hampir tidak pernah diimplementasikan di tingkat daerah, mengukur keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. INCITEGov menyelenggarakan sesi pembelajaran dengan dihadiri 53 perwakilan dari CSO di La Trinidad, Benguet, agar mereka dapat memahami proses pengadaan secara lebih baik dan mempelajari berbagai data berbeda yang tersedia di dalam pemerintah yang akan membantu mereka memonitor kinerja pengadaan.

CSO-CSO lalu meminta data pengadaan dari pemerintah dan menggunakan *portal* Jasa Pengadaan Elektronik Pemerintah Filipina (*Philippine Government Electronic Procurement Service*) untuk mengakses data pengadaan. **Dalam lokakarya konsultatif dengan pemerintah, mereka meminta dan memperoleh data tentang tender dan penunjukan, serta kontrak. Mereka menggunakan data tersebut untuk menilai pemerintah daerah dalam hal kepatuhan pengadaan. Keterlibatan awal ini menjadi dasar peningkatan partisipasi CSO dalam mencapai pengadaan yang lebih transparan di tingkat daerah.** INCITEGov saat ini tengah mendokumentasikan praktiknya dan menyusun pedoman tentang bagaimana kelompok masyarakat dapat memonitor pengadaan pemerintah di tingkat daerah, dan bagaimana pemain lokal dapat melakukan advokasi berbasis bukti dalam reformasi pengadaan. Dokumentasi ini akan diterbitkan sebagai sebuah bab dalam buku mengenai reformasi pengadaan.

E-Net Philippines mengadvokasi penggunaan Dana Pendidikan Khusus (*Special Education Fund* (SEF)) secara lebih baik. Dana ini diberikan oleh Dewan Sekolah Daerah (*Local School Boards* (LSB)), di mana 40% anggotanya berasal dari masyarakat sipil. SEF dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan sistem sekolah umum. Dana ini setara dengan 1% dari nilai setiap property riil yang telah diberikan penilaian dan dikumpulkan bersama dengan pajak properti yang dibayarkan ke pemerintah daerah.

Melalui proyek ini, E-Net memulai pengembangan proses dimana LSB dapat memonitor penganggaran dan penggunaan SEF, menggunakan data terbuka yang disediakan melalui *Full Disclosure Policy Portal* (FDPP). FDPP adalah portal pemerintah di mana unit-unit pemerintah daerah diwajibkan untuk mengunggah rencana, anggaran, laporan keuangan, dan dokumen keuangan terkait lainnya ke dalam format yang dapat dibaca mesin. Proyek percontohan mereka dilakukan di dua lokasi di Mindanao Utara, yaitu Kidapawan dan Alamada.

3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

Sebelum proyek ini, *monitoring* terhadap SEF di lokasi percontohan sangatlah rendah karena kurangnya kesadaran dan informasi tentang peran LSB dan kurangnya data tersedia yang dapat digunakan dalam memonitor penggunaan dana. Saat ini, pemerintah daerah diwajibkan mencantumkan laporan penggunaan SEF ke dalam FDPP dan anggota masyarakat sipil dapat mengaksesnya untuk memonitor pembelanjaan. **Dengan meningkatnya kesadaran mengenai topik-topik ini, lebih dari 100 anggota CSO dari dewan sekolah dari dua kota kini berada dalam posisi yang lebih baik untuk memonitor penggunaan dan bertanya pada pemerintah daerah mengenai bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkan hasil pendidikan di tingkat daerah.** Dengan akses ke data dan pengetahuan untuk menganalisisnya, mereka merasa terberdayakan untuk terlibat dengan pemerintah dalam mendiskusikan tuntutan mereka terkait pembelanjaan untuk pendidikan yang lebih baik. Untuk mendokumentasikan pembelajaran dari proses ini, E-Net saat ini tengah menyusun *Toolkit* Data Terbuka dan SEF yang dapat digunakan LSB untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran pendidikan.

Kesadaran tentang data terbuka juga diterjemahkan ke dalam poin-poin yang dapat ditindaklanjuti ketika seorang peserta lokakarya E-Net mendekati *Unit* Pemerintah Daerah (LGU) serta Departemen Pendidikan, dan menggunakan data SEF untuk mengakses dukungan finansial untuk para ustadz. Sebagai hasil dari pengalaman positif dalam mengakses data dan menggunakannya untuk advokasi, peserta ini kemudian mengajarkan kelompok guru ini bagaimana mengakses SEF. Mereka lalu membentuk *North Cotabato Federation of Madrasa Community Ustadz* pada Juli 2015, dimana setelahnya mereka meminta agar gaji ustadz mereka didanai oleh SEF. Dua dari delapan permintaan sekarang mendapatkan alokasi dana khusus. Lobi ini meluas ke kemenangan lainnya, yaitu akses ke anggaran untuk seragam guru-guru agama tersebut. Mereka berharap inisiatif mereka akan memiliki efek pengali dan dapat memberdayakan lebih banyak ustadz untuk meminta lebih banyak alokasi anggaran dari SEF.

TAHAP 3: ANALISIS DAN REFLEKSI PROYEK

Setelah Tahap Dua, lokakarya kedua diselenggarakan, dimana mitra proyek menunjukkan dan mendiskusikan hasil proyek percontohan mereka. Setiap organisasi, bersama dengan para pendamping dan anggota tim Jakarta Lab, diberikan kesempatan untuk secara sistematis menilai temuan, merefleksikan hasilnya, dan memfasilitasi analisis mendalam tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan dalam inisiatif tersebut. Sebuah analisis komparatif yang dilakukan terhadap proyek-proyek berdasarkan konteks lokal mereka yang berbeda-beda, juga membuat peserta dapat mengidentifikasi kelemahan umum dalam penggunaan data terbuka untuk mempromosikan keterbukaan fiskal.

4. Apa yang kami pelajari?

Data terbuka dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu CSO meningkatkan keterbukaan fiskal.

Data terbuka menguntungkan organisasi yang bekerja di bidang keterbukaan fiskal dalam banyak hal. Dengan proyek ini, organisasi lokal seperti IDEA mampu mengurangi waktu pengolahan dalam mempersiapkan data anggaran untuk dianalisis dan diseminasi, serta membuat presentasi informasi, penjangkauan, dan advokasi menjadi lebih efisien dan responsif.

Dalam kasus E-Net, menggunakan data pendidikan terbuka dan memberikan pelatihan kepada CSO lain meningkatkan jumlah organisasi yang mengadvokasikan pembelanjaan pendidikan yang lebih baik, sehingga memperluas jaringan dan pengaruh E-Net. Hal ini juga memunculkan lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam hal pengalokasian sumber daya.

Gambar 11. E-Net memperkenalkan data terbuka kepada kelompok pendidik yang lebih luas melalui jaringan mereka. Melalui proyek ini, mereka mampu mendapatkan lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam mendorong adanya pendidikan yang lebih baik.



Data terbuka memiliki potensi untuk memperkuat kemitraan antara CSO dan pemerintah daerah untuk mencapai keterbukaan dan akuntabilitas publik yang lebih baik.

Sementara mitra proyek telah pernah bekerja sama dengan pemerintah daerah, sebuah dimensi baru dalam bidang pengungkapan dan keterbukaan muncul karena proyek ini. Contohnya, Pattiro Surakarta mampu mempengaruhi pemangku kepentingan daerah untuk melihat bahwa ada nilai tambah dalam

4. Apa yang kami pelajari?

membuat data pemerintah tersedia untuk publik. Selain pemerintah daerah di tingkat kelurahan (Tipes, Pajang, dan Serengan), terdapat beberapa lembaga pemerintah, termasuk lembaga transportasi, informasi, dan komunikasi, yang tertarik untuk menerbitkan data mereka. Meskipun tidak berhasil dalam upaya awal, mereka telah menindaklanjuti diskusi ini dengan departemen yang tertarik dan mulai membangun kemitraan untuk secara proaktif mengungkapkan data pemerintah.

Dalam hal INCITEGov, penggunaan indikator *monitoring* membuat CSO dapat memahami pengadaan publik dan bagaimana mereka dapat menggunakan data terbuka untuk memonitor kepatuhan pemerintah terhadap peraturan pengadaan. Hal ini penting karena menurut undang-undang Filipina, CSO diharapkan terlibat secara aktif dalam proses pengadaan, terutama dalam pembukaan dokumen *tender* publik. Lebih jauh lagi, mereka juga memiliki kesadaran yang lebih kuat sebagai kelompok masyarakat sipil untuk dapat dan seharusnya membuat pemerintah daerah mereka akuntabel dalam proses pemberian kontrak. Ini meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk berpartisipasi bersama pemerintah dalam *Bids and Awards Committee*, sebuah badan formal yang menjamin keterbukaan dalam pengadaan pemerintah.

Data terbuka dapat memfasilitasi proses yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait isu-isu keterbukaan fiskal publik.

Sebuah hasil penting dari proyek percontohan adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait isu-isu transparansi fiskal publik di masing-masing kota. Contohnya, ketika IDEA melaksanakan survey untuk menguji efektivitas intervensi, mayoritas responden menyatakan kepuasan dan bahkan optimisme baru mereka terhadap adanya saluran-saluran baru seperti situs *Web Data Terbuka APBD*¹⁸, yang membuat masyarakat lebih mudah mengakses data anggaran dan memperoleh informasi tentang program yang didanai pemerintah di Yogyakarta. Ini berujung pada meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang pengeluaran yang telah dianggarkan dan pengeluaran aktual kota, dan meningkatnya minat dalam hal keterlibatan publik untuk membantu mendistribusikan dana ke bidang-bidang relevan yang mungkin kurang atau tidak mudah terpantau oleh pemerintah.

Di kota Kidapawan tempat E-Net menerapkan *Toolkit* Data Terbuka dan SEF, orang tua dan guru, yang mewakili organisasi mereka dalam LSB, menyadari pentingnya memonitor bagaimana SEF dianggarkan dan digunakan. Menyadari bahwa dana ini dialokasikan menurut undang-undang untuk membantu meningkatkan hasil pendidikan, mereka mulai mempertanyakan, menggunakan data yang mereka dapat akses, mengapa dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap hasil pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. **Tanpa akses ke data dan pengetahuan undang-undang yang relevan, masyarakat tidak akan dapat mengidentifikasi dan menilai isu-isu transparansi fiskal publik yang penting.**

¹⁸ Sumber: <http://idea.arcapada.info/>

5. Apa hal-hal kunci yang dapat kami ambil?

Implementasi proyek data terbuka oleh mitra kami di Indonesia dan Filipina menunjukkan potensi besar, tapi juga menyoroti tantangan-tantangan yang signifikan. Pertama, proyek-proyek ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kapasitas pihak perantara, dalam hal ini CSO, terkait hubungan antara hak atas informasi, data terbuka, undang-undang transparansi fiskal publik, proses, dan sistem, agar mereka dapat secara berarti terlibat dengan pemerintah daerah untuk membantu tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Dalam banyak kasus, CSO tidak menyadari hak mereka atas akses data di bawah undang-undang FOI, dan apabila data telah diungkap secara proaktif, CSO tidak menyadari bahwa data tersebut ada. Proyek ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami konteks lokal secara lebih baik, sehingga inisiatif data terbuka dapat didesain dan diimplementasikan sebaik mungkin agar cocok dengan kebutuhan lokal. Contohnya, **di tempat-tempat dengan penetrasi *Internet* rendah dan dimana masyarakat masih mengandalkan surat kabar sebagai sumber informasi terpercaya, visualisasi data bersama dengan artikel yang menjelaskannya akan menciptakan dampak yang sama atau lebih besar dibandingkan *portal online*.** Kami membahas lebih banyak pembelajaran di bawah ini.¹⁹ Kami harap ini akan berguna dalam menginformasikan proyek-proyek serupa di masa mendatang, baik di dalam dan luar wilayah yang bersangkutan.

Pembelajaran

1

Pejabat pemerintah seringkali menganggap bahwa membuka data mengandung risiko terlalu besar. Perlu untuk meyakinkan pemerintah untuk secara proaktif membuka data dengan proses yang difasilitasi dengan benar agar dapat menciptakan keterlibatan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Beberapa mitra proyek kami menemukan keraguan dan kekuatiran yang cukup besar dari para pejabat dalam memberikan data yang diminta, bahkan di dalam situasi di mana terdapat kerangka hukum yang mengatur akses terhadap data. Kekuatiran ini berdasarkan pada ketakutan bahwa data tersebut dapat digunakan untuk menyerang pemerintah apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, ketidacukupan administratif, atau ketidaksetujuan dengan proses yang ada. **Namun data terbuka bukanlah hanya tentang “anti korupsi” atau mengatakan “anda ketahuan,” tapi lebih kepada membantu untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif.** Proyek percontohan menunjukkan perlunya menjelaskan dari awal intervensi bahwa tujuan keseluruhan dan jangka panjangnya adalah untuk mengembangkan sistem permanen untuk mencegah dan mengurangi korupsi, dan bukan untuk mengembangkan kasus tertentu terhadap individu tertentu.

¹⁹ Proses mendapatkan pembelajaran adalah proses partisipatif yang melibatkan seluruh pendamping dan mitra proyek. Ini merupakan proses yang difasilitasi, yang membutuhkan enam bulan di bawah koordinasi Michael Gurstein.

5. Apa hal-hal kunci yang dapat kami ambil?

Pembelajaran

2

Proses administratif atau kerangka hukum merupakan hal yang penting untuk menjamin implementasi dan kontinuitas inisiatif data terbuka.

Tampak jelas dari pengalaman mitra proyek kami bahwa memperoleh akses ke data saja tidaklah cukup dan kurang bernilai dalam jangka panjang. Justru, solusi yang lebih efektif dan bertahan lama adalah untuk mendesain dan melaksanakan proses administratif serta kerangka hukum yang mendukung praktik data terbuka, yang memungkinkan ruang untuk tidak hanya mengakses, tapi juga menganalisis, menggunakan, menafsirkan, dan menyebarkan data atau temuan data.

Terdapat miskonsepsi yang luas dalam lingkaran pemerintah dan bahkan kelompok masyarakat sipil bahwa data terbuka hanya khusus menyangkut “advokasi” untuk pembukaan data, mungkin karena banyaknya organisasi advokasi yang telah lama terlibat untuk menekan pemerintah demi memperoleh akses ke data. **Namun, sebagai bagian dari proses bekerja sama dengan pemerintah, kami merasa perlu untuk menekankan bahwa data terbuka adalah tentang membangun struktur dan kerangka kebijakan pemerintah dan administratif yang tepat, yang memiliki fungsi jauh melebihi pengungkapan secara proaktif, dan juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses, menganalisis, menggunakan, dan menafsirkan data.** Contohnya, meski mitra INCITEGov dapat memperoleh data terkait pengadaan untuk membantu mereka menganalisis kepatuhan pengadaan, ini hanya mungkin dilakukan karena INCITEGov memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah. Tanpa hubungan ini, meminta dan mengakses data akan sangat sulit, terutama karena Filipina tidak memiliki undang-undang hak atas informasi.

Gambar 12 dan 13. Nino Versoza dari INCITEGov menjelaskan proyek mereka yang berfokus pada pengadaan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Benguet, dan pejabat pemerintah dari Surakarta berpartisipasi dalam diskusi kelompok terfokus data terbuka Pattiro.



5. Apa hal-hal kunci yang dapat kami ambil?

Pembelajaran

3

Memfokuskan pada perantara (*intermediaries*) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang substansif dalam sektor-sektor yang mereka tangani adalah cara yang efektif untuk menjamin keberlanjutan penggunaan data keuangan yang terbuka.

Kami menemukan bahwa memberikan keterampilan dan pengetahuan tentang data terbuka kepada CSO yang sudah ahli dalam bidangnya merupakan hal yang efektif. Proyek ini menggunakan strategi ini, yaitu pertama memilih kelompok dengan pengalaman tinggi dan kredibilitas luas dalam bidang-bidang khusus terkait transparansi, dan setelahnya melatih mereka dalam hal keterampilan dan teknik data terbuka. Contohnya, pengenalan tentang konsep data terbuka memperkuat kemampuan E-Net di Filipina untuk mengadvokasikan penggunaan SEF secara lebih baik.

Alternatifnya, yaitu memilih kelompok dengan pengalaman dan pengetahuan tentang data terbuka, lalu melatih mereka di bidang-bidang di sektor tertentu (seperti anggaran dan pembelanjaan, pendidikan, atau kesehatan) akan membutuhkan seperangkat intervensi yang berbeda, sebagian besar terkait dengan membuat organisasi ini memahami konteks dan sifat data yang mereka tangani.

Selain itu, kami menemukan bahwa tampaknya terdapat manfaat jangka panjang dalam menghubungkan organisasi lintas sektoral non-pemerintah melalui inisiatif data terbuka, agar mereka tidak tetap terisolasi. Dalam kasus IDEA, mereka bekerja dengan organisasi lokal lain dari Yogyakarta, yang membantu IDEA dalam mengembangkan *portal* data terbuka serta mengedukasi publik mengenai manfaat penggunaan data. Kemitraan ini membantu organisasi mengerjakan sektor-sektor lain yang tidak terkait dengan transparansi anggaran untuk menganalisis bagaimana pemerintah juga berinvestasi di dalam pengembangan teknologi atau penciptaan pengetahuan.

Kolaborasi antara pemangku kepentingan yang berbeda-beda merupakan hal yang penting dalam ruang transparansi fiskal, karena alokasi sumber daya publik akan membicarakan prioritas pemerintah dan mengungkapkan pertukaran yang signifikan antar sektor.

5. Apa hal-hal kunci yang dapat kami ambil?

Pembelajaran

4

Setelah suatu organisasi dilengkapi dengan keterampilan dan pengalaman untuk menggunakan data terbuka dalam satu sektor, mereka dapat menggunakan pengetahuan yang sama dan menerapkannya ke sektor dan advokasi lainnya.

Kami memperoleh pelajaran yang menarik, **yaitu setelah suatu CSO dilatih mengenai data terbuka – artinya mereka sudah mampu mengakses, menganalisis, dan menggunakannya dengan nyaman – mengalihkan atau menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang sama ke proyek atau sektor lain menjadi mudah dilakukan.** Ini terjadi misalnya dengan mitra-mitra INCITEGov, yang, setelah menghadiri pelatihan, menyadari bahwa mereka dapat menggunakan keterampilan yang mereka pelajari tentang data terbuka ke dalam advokasi inti dari organisasi mereka masing-masing, dalam hal budaya, pemberdayaan perempuan, dan hak-hak anak. Melihat data pengadaan dan *dataset* yang dibuat tersedia melalui portal Kebijakan Pengungkapan Penuh, mereka menyadari bahwa menganalisis *dataset* akan membuat mereka mampu memahami bagaimana pemerintah daerah menginvestasikan sumber dayanya untuk mempromosikan budaya, memberdayakan perempuan, atau melindungi hak-hak anak. Signifikansi temuan ini berdampak pada strategi jangka panjang untuk menanamkan orientasi data terbuka ke dalam tema atau bidang yang saat ini mungkin kurang memadai. Contohnya, dengan mendesain pelatihan dan kerangka data terbuka di seputar suatu isu khusus yang masih dapat diaplikasikan secara luas, dan mengajarkan hal ini kepada kelompok masyarakat sipil yang memiliki kegiatan di banyak sektor, kami dapat meningkatkan peluang organisasi ini untuk mengadaptasi data terbuka untuk kegiatan yang lebih luas seiring waktu.

Kegiatan yang berkaitan dengan data terbuka juga menstimulasi CSO untuk menjadi lebih paham teknologi dan mengembangkan kemitraan antara CSO dan masyarakat teknologi. Contohnya, satu CSO menemukan bahwa keterlibatan mereka di dalam proyek membuat mereka menjadi lebih paham dan sadar teknologi, sehingga membuat mereka mampu mengembangkan kemitraan baru dengan kelompok berorientasi teknologi. Ini dilihat sebagai perkembangan signifikan dan positif oleh CSO, karena hal ini memberikan nilai tambah, yaitu mampu mempengaruhi organisasi lain dan memperluas jaringan dan hubungan mereka untuk saat ini dan masa depan.

Sebagai contoh konkrit, kedua perubahan ini terjadi dengan Perkumpulan IDEA. Pertama, mereka mampu menggunakan keterampilan data terbuka mereka melalui proyek ini dalam menyusun sebuah proposal pendanaan yang berpotensi menggunakan data terbuka dalam memonitor Dana Pembangunan Desa. Kedua, melihat kebutuhan untuk menggunakan *portal* untuk menampung data anggaran yang mereka ambil dan visualisasikan, mereka bermitra dengan suatu organisasi teknologi dan meluncurkan *portal* tersebut, serta menggunakan *Facebook* dan *Twitter* untuk menyiarkan informasi terkait anggaran dan terlibat dengan masyarakat dalam diskusi-diskusi yang berguna.

5. Apa hal-hal kunci yang dapat kami ambil?

Pembelajaran

5

Data terbuka mendorong advokasi berbasis bukti. Hal ini menjadi suplemen yang baru dan efektif bagi hak-hak, hukum, dan proses advokasi berbasis bukti yang ada, serta meningkatkan kredibilitas kelompok masyarakat di antara sesama warga negara and pemerintah.

Sejumlah besar CSO dari sektor-sektor dimana proyek ini dilakukan telah bekerja dari posisi subyektif untuk mendukung kegiatan advokasi mereka. Data terbuka memiliki efek untuk mengalihkan persepsi publik tentang (dan sejauh mana realitasnya) organisasi-organisasi ini terhadap “data” atau posisi berbasis “bukti” yang kemudian meningkatkan kredibilitas untuk mereka dan posisi mereka. Merasa diberdayakan dengan ini, organisasi-organisasi tersebut menjadi lebih baik dalam mengerjakan, menambahkan, dan menggunakan data terbuka dalam kegiatan mereka di masa mendatang.

Gambar 14. Tenti Kurniawati dari IDEA menjelaskan data anggaran dan belanja Yogyakarta dari 2012 hingga 2014 di acara publik di Manila, menggunakan visualisasi surat kabar.



6. Bidang-bidang untuk Penelitian di Masa Mendatang

Proyek *OD4Transparency* tidak didesain untuk memberikan pendekatan dan solusi transparansi fiskal yang universal kepada mitra proyek atau bidang sasaran mereka. Kami justru melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan pendekatan berkelanjutan meski dihadapkan pada keterbatasan proyek percontohan, seperti periode implementasi yang singkat, dana yang tetap, dan peluang peningkatan kegiatan yang terbatas.

Kami telah mengidentifikasi dua bidang prioritas untuk diteliti lebih lanjut.

- Pertama, inisiatif yang dijabari dalam proyek percontohan ini adalah mengenai perencanaan dan penganggaran, monitoring pengadaan, dan penggunaan anggaran – pendekatan individu dan terisolasi yang tidak mencakup seluruh rantai keuangan publik. **Terdapat kebutuhan untuk menguji apakah memfokuskan pada satu aspek saja dari sistem manajemen keuangan publik pemerintah daerah akan mempengaruhi praktik transparansi keuangan dari seluruh organisasi.**
- Kedua, **meskipun proyek-proyek ini berperan sangat penting dalam memulai proses pembukaan data keuangan secara proaktif, pertanyaannya apakah praktik baru ini akan dipertahankan oleh pemerintah, mengingat keraguan mereka di awal, terutama dalam konteks Indonesia, di mana pengungkapan data secara proaktif oleh lembaga pemerintah daerah bukanlah praktik yang umum.** Perantara dalam proyek ini mampu memanfaatkan data yang dapat mereka akses, tapi apabila pemerintah memutuskan tidak lagi melanjutkan menerbitkan data, maka hal ini merupakan tantangan besar bagi organisasi. Karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana praktik-praktik pengungkapan informasi secara proaktif dapat dilembagakan dalam konteks daerah.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program ini, kunjungi situs kami di labs.webfoundation.org atau hubungi kami di info@labs.webfoundation.org. Sumber-sumber lainnya, seperti Panduan Pelaksanaan (*How-to-Guide*) kami untuk program ini dan presentasi yang membahas tentang program ini juga tersedia di bagian “Sumber” (*Resources*) di situs kami.

Tentang World Wide Web Foundation

World Wide Web Foundation didirikan pada tahun 2009 oleh penemu *Web*, Sir Tim Berners-Lee, untuk memajukan *Web* terbuka sebagai komoditas publik dan hak dasar. Kami berupaya untuk membangun masa depan di mana *Web* memberdayakan semua orang, di semua lokasi, untuk turut mengambil bagian dalam menciptakan dunia yang lebih adil.

Bagian dari visi kami adalah agar data - sumber kehidupan masyarakat digital - digunakan untuk kepentingan umum. Kami berupaya untuk membuka data online agar setiap orang dapat memahami dan menggunakannya untuk mengatasi masalah-masalah yang penting bagi mereka.

Tentang Open Data Lab Jakarta

Didirikan pada tahun 2014, *Open Data Lab Jakarta (Web Foundation)* bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah di Asia Tenggara untuk menemukan cara-cara inovatif untuk menggunakan data dalam memecahkan tantangan-tantangan masyarakat sipil. Tujuan kami adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menggunakan data.

Lab Jakarta adalah yang Lab pertama dari serangkaian Lab yang rencananya akan didirikan di negara-negara berkembang, dan Lab di Afrika akan menyusul dalam waktu dekat.

Ucapan Terima Kasih

Proyek ini dapat dilakukan dengan dukungan dari mitra pemberi dana kami, *Southeast Asia Technology and Transparency Initiative (SEATTI)*, serta masing-masing mitra proyek, *E-Net Philippines*, *INCITEGov*, *Pattiro Surakarta*, dan *Perkumpulan IDEA*. Dukungan pendanaan umum untuk *Open Data Lab Jakarta* diberikan dengan murah hati oleh *Ford Foundation*.

Ucapan terima kasih tulus juga ingin kami ucapkan kepada para pendamping proyek, yang mencurahkan waktu, keahlian, dan ide-ide mereka tentang bagaimana mengembangkan dan meningkatkan masing-masing proyek ini lebih jauh lagi.

Kesuksesan kami adalah juga keberhasilan kolega dan kolaborator kami, sedangkan segala ketidaktepatan atau kesalahan di makalah ini adalah semata kesalahan kami sendiri.

Open Data Lab Jakarta

 labs.webfoundation.org
 [@ODLabJkt](https://twitter.com/ODLabJkt)
 info@labs.webfoundation.org

World Wide Web Foundation

 webfoundation.org
 [@webfoundation](https://twitter.com/webfoundation)
 contact@webfoundation.org

